

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prosesi Tradisi Baritan

1. Pengertian Tradisi

Definisi tradisi dalam bahasa Inggris yaitu *trader* atau *traderer* yang mempunyai arti menyalurkan atau memberi untuk diamankan.²⁷ Dalam hal ini, tradisi merujuk pada suatu ide, kepercayaan atau perilaku yang berasal dari masa lalu dan memiliki makna simbolis yang diberikan kepada suatu kelompok atau masyarakat secara turun temurun. Menurut etimologi, tradisi merujuk pada adat atau kebiasaan dari generasi ke generasi, atau peraturan yang ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.²⁸

Tradisi kebudayaan tertentu bukan tidak mungkin dibiarkan tanpa nilai. Tradisi juga menganut tata nilai. Tata nilai adalah pengertian baik dan buruk, benar dan salah, pantas dan tidak pantas, adil dan tidak adil, dan halal dan tidak halal, yang kesemuanya bersumber dari agama, kepercayaan, mitologi, dan ideologi yang hidup di masyarakat.²⁹ Tradisi menurut Esten merupakan suatu masyarakat yang mempunyai nilai-nilai budaya kemudian dijadikan landasan untuk dapat melakukan kebiasaan dan pada akhirnya diturunkan kepada generasi selanjutnya.³⁰ Sedangkan Soerjono menyatakan

²⁷ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung : Nusamedia, 2014), 97.

²⁸ Ali Puddin Al Ubaidillah dkk, Pengaruh Budaya dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari pada Masyarakat di Kota Samarinda, *Jurnal Adat dan Budaya*, Vol. 3(2), 2021, 70.

²⁹ Mohammad Arif dan Yuli Darwati, Koherensi Kehidupan Multikultural di Masyarakat Desa Tanon Kec. Papar kab. Kediri, *Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol. 31(1) 2022, 74.

³⁰ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Percetakan Angkasa, 1999), 21.

bahwa tradisi adalah pengulangan suatu perbuatan dalam bentuk yang sama.³¹

Seyyed Hossein Nasr memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tradisi, di mana ia menggambarannya sebagai sesuatu yang bersifat sakral. Menurutnya, penyampaian suatu tradisi bisa dilakukan oleh manusia, di mana penyampaian tersebut lewat wahyu, dan berkembang dalam peran sakralnya dalam sejarah kemanusiaan.³²

Pendapat Coomas mengenai tradisi menyatakan bahwa tradisi ialah sesuatu yang mencerminkan perilaku seseorang yang terbentuk melewati proses panjang, dan tetap terjaga dilakukan secara terus menerus dari masa ke masa.³³ Sementara itu, Basrin dan Barwin dalam Najamudin dkk mendefinisikan bahwa tradisi sebagai tindakan yang secara kolektif disalurkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik dalam ruang lingkup masyarakat tertentu.³⁴ Dengan demikian, tradisi merupakan sebuah kebiasaan, perilaku yang dilestarikan secara turun-temurun dan bersifat sakral.

2. Tradisi Baritan

Istilah Baritan bermula dari kata “lebar rit-ritan” yang berarti bermacam-macam atau bersama-sama.³⁵ Ini termasuk jenis upacara

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), 13.

³² Seyyed Hossein Nasr, *Islam ditengah Kancah Dunia Modern* (Bandung: Pustaka, 1994), 3.

³³ Coomans, M. 1987. *Manusia Dayak Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. (Jakarta: pt gramedia, 1987), 73.

³⁴ Najamudin dkk, Solidaritas Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tradisi Pesta Ponan Di Desa Poto Kabupaten Sumbawa: Kajian Antropologi Sastra, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 (3) 2023, 2504.

³⁵ Ma'ruf Hidayata dan Henti Lutfiah, Analisis Makna Dan Eksistensi Tradisi Bebaritan Dalam Pandangan Keagamaan (Studi Pada Desa Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes), *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 24(1), 2023, 126.

selamatan di bulan Suro bertujuan untuk memohon keselamatan. Tradisi menyambut bulan Syuro menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Islam Jawa. Tujuan masyarakat melakukan tradisi Baritan adalah untuk meminta keselamatan kepada Tuhan, mencegah bahaya yang datang, sebagai perayaan tahun baru hijriah, dan juga sebagai pengingat mengenai momen bersejarah para Nabi pada tanggal sepuluh Muharram.³⁶

Masyarakat Jawa sendiri telah melakukan tradisi baritan sebagai bagian dari acara keagamaan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga sering kali menjadi acara pertunjukan. Desa lain juga melakukan tradisi tersebut, namun setiap desa mempunyai caranya masing-masing dalam melaksanakannya.³⁷ Pelaksanaan tradisi baritan biasanya terletak di perempatan jalan yang bertujuan meminta petunjuk, keselamatan dari Tuhan, dan juga sebagai ekspresi rasa syukur masyarakat yang dilakukan di bulan Suro.

Istilah Suro telah dikenal di dalam kehidupan masyarakat Jawa, adapun Suro berasal dari bahasa Arab *Asyura* yang bermakna kesepuluh, merujuk pada tanggal 10 Muharram yang pada akhirnya digunakan sebagai bulan awal dalam kalender Jawa.³⁸ Bagi masyarakat Jawa, perayaan bulan Suro telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi Suroan menekankan pada kedamaian dan keamanan batin. Oleh karena itu, pada malam Suro

³⁶ Zahrotul Izzah, Fadli Azis Darmansyah, Fithror Robi', "Tradisi Baritan di Dusun Palulo Kabupaten Blitar: Kajian Living Hadis" *Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 2 (2) 2022, 131.

³⁷ Whilda Syafitri, Robby Hidajat, and Tutut Pristiati, "Makna Sesaji Pada Tradisi Baritan Desa Dermojayan Kabupaten Blitar," *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*, vol 2 (6) 2022, 860.

³⁸ Muhammad Fahrizal Hakim, "Pantangan Menikah di Bulan Suro bagi Masyarakat Desa Batur Kec. Getasan Kabupaten Semarang", *Quru': Journal of Family Law and Culture*, vol. 1(1) 2023, 43.

sering diadakan pengajian di mana semua orang yang hadir berkumpul untuk merayakannya. Tujuan dari pengajian tersebut adalah untuk mendapatkan berkah dan mengusir kejahatan.³⁹ Kegiatan tradisi Baritan di Dusun Sumberagung biasanya dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Suro bertempat di perempatan jalan yang dihadiri oleh seluruh masyarakat, baik dari warga NU maupun warga LDII.

B. Implementasi Kerukunan antara NU dan LDII dalam Tradisi Baritan

1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi jika merujuk pada KBBI, memiliki arti pelaksanaan atau penerapan.⁴⁰ Umumnya, implementasi merujuk pada tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan.⁴¹ Menurut kamus Webster dalam Solichin menyatakan bahwa implementasi atau *to implement* dapat dijelaskan secara singkat sebagai penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu atau memberikan efek praktis terhadap suatu hal. Dengan kata lain, untuk menerapkan suatu konsep, diperlukan dukungan sarana yang dapat menghasilkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.⁴²

Implementasi menurut Usman ialah melibatkan pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa implementasi tidak hanya tindakan semata,

³⁹ Defani Mauludi Dwi Putra, Landasan Teologi dalam Tradisi Asyura Masyarakat Syiah di Desa Pasirhalang, *jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2(3), 2022, 601.

⁴⁰ Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, (Jakarta: CV Adi Perkasa), 633.

⁴¹ Yuliah, E. Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol 30(2), 2020. 133.

⁴² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 65.

melainkan kegiatan yang sudah terjadwal dalam rangka memperoleh tujuan tertentu.⁴³ Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi ialah interaksi antara tindakan dan tujuan disesuaikan untuk mencapainya. Dalam hal ini, implementasi memerlukan kerja sama yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat serta membutuhkan struktur organisasi yang berfungsi dengan baik, seperti birokrasi yang efektif.⁴⁴ Sebaliknya Winarno berpendapat mengenai implementasi biasanya berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan dalam rangka menggapai tujuan. Proses implementasi melibatkan penggunaan sarana pendukung yang dapat menghasilkan efek atau konsekuensi terhadap suatu hal.⁴⁵

Dengan demikian, implementasi adalah kiat menjalankan rencana dan kebijakan dalam rangka menggapai maksud tertentu, yang tentu saja melibatkan langkah-langkah konkret yang sudah direncanakan dengan matang, dalam prosesnya juga membutuhkan dukungan sarana untuk memberikan dampak pada sesuatu itu.

2. Pengertian Kerukunan

Kerukunan dalam KBBI mempunyai arti “hidup bersama masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran”.⁴⁶ Mempunyai makna bahwa sumber dari kerukunan adalah ketulusan hati dan bukan merupakan sebuah paksaan, suatu kesepakatan yang lahir dari sosio-

⁴³ Nurdin Usman, *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

⁴⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 39.

⁴⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), 102.

⁴⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, (Jakarta: CV Adi Perkasa), 1421.

kultur religious (bukan kesepakatan struktural) yang berlangsung secara adat.⁴⁷ Kerukunan secara etimologis, yaitu *rukun* yang dari bahasa Arab mengandung makna tiang, dasar, atau sila. Bentuk jamak dari *rukun* adalah arkaan. Dari konsep arkaan, dapat dipahami mengenai kerukunan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur yang berbeda, di mana setiap unsur saling mendukung satu sama lain. Kesatuan tersebut tidak bisa terpenuhi jika salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik.⁴⁸

Dalam bahasa Inggris, kerukunan sering kali disepadankan dengan *harmonius* atau *concord*, yang artinya kondisi sosial yang ditandai adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan. Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan sebagai integrasi sosial, kerukunan merupakan proses terciptanya dan terpeliharanya interaksi yang beragam diantara unsur-unsur yang berbeda dan otonom.⁴⁹

Paulus Wirutomo menyatakan bahwa kerukunan ialah usaha untuk menyatukan makhluk sosial lewat memperkenalkan perasaan nyaman dan tentram, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Hal ini dilakukan sebagai upaya menerapkan konsep-konsep tertentu demi terwujudnya integrasi sosial dalam masyarakat.⁵⁰ Dengan demikian,

⁴⁷ Ahmad Subakir, *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Gambaran Ideal Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa di Pusat Kota Kediri Perspektif Trilogi Kerukunan dan Peacebuilding*. (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), 18.

⁴⁸ Marlen Novita Makalew dkk. Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado. *GOVERNANCE*, vol 1(1), 2021. 5.

⁴⁹ Khainudin dan M. Thoriqul Huda, Potret Harmoni Kehidupan Antar Umat Beragama di Desa Besowo Kabupaten Kediri, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 33(2), 2022, 336.

⁵⁰ Paulus Wirutomo, dkk, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2012), 58.

kerukunan tidak hanya mencakup aspek keharmonisan antar individu, tetapi juga melibatkan upaya untuk menciptakan kesatuan dan kebersamaan dalam struktur sosial yang lebih luas.

Bagi Durkheim, kerukunan merupakan hasil dari hubungan antar umat beragama sehingga menghasilkan ikatan sosial, hal tersebut tidak bersifat individualistik, melainkan bersifat kolektif untuk menciptakan kesatuan dalam masyarakat yang di mana tokoh agama dan tokoh masyarakat mempunyai peran dalam lingkungan tersebut. Kesimpulan dari Durkheim, menekankan pentingnya untuk menyingkirkan diskriminasi melalui pengakuan dan penghormatan keragaman dalam prinsip pluralisme demi terwujudnya kerukunan.⁵¹

Dalam definisi lain, kerukunan diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok memiliki kehidupan sosial yang damai, saling menghormati satu sama lain untuk mengurangi kemungkinan konflik, dan upaya penyatuan gagasan guna mencapai kepentingan dan kesejahteraan bersama. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan satu sama lain dan dengan pengembangan sikap dari hati untuk dapat bergaul satu sama lain tanpa adanya prasangka negatif dan tanpa intervensi dari luar.⁵² Merukunkan juga berarti melakukan tindakan damai, menyatukan hati dan pikiran. Kerukunan adalah mencapai kesepakatan di tengah perbedaan, di mana perbedaan

⁵¹ Musahadi, *HAM, Mediasi dan Konflik di Indonesia* (Semarang: WMC, 2007), 57.

⁵² Faisal Ismail, *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 1.

dianggap sebagai titik awal untuk membangun hubungan sosial yang saling memahami, pengertian, dan menerima dengan tulus.⁵³

Di Indonesia, istilah kerukunan kerap kali disinonimkan dengan kata harmoni atau toleransi dan dipakai sebagai bahasa etika pergaulan. Sebuah kondisi atau tatanan sosial dikatakan rukun, menurut Niels Mulder, apabila ia berada dalam keadaan selaras, “tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan pertentangan, dan bersatu dalam maksud untuk saling membantu.

C. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Sosiologi lahir berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Eropa Barat pada masa revolusi industri (Inggris) dan revolusi sosial (Prancis). Pada awalnya, diharapkan bahwa kedua revolusi ini akan membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, pada kenyataannya revolusi menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antarwarga masyarakat dan berbagai kesenjangan sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat.⁵⁴

Sebagaimana disebutkan di atas, munculnya kekacauan, disharmoni, dan kesenjangan sosial dalam masyarakat telah mendorong para sosiolog untuk berusaha menjelaskan alasan di balik munculnya berbagai masalah sosial masyarakat. Untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut, secara teoritik para sosiolog menjelaskan dengan berbagai teori sosial. Berkenaan

⁵³ Supardi dan Agus Kharir, Kerukunan Antar Umat Beragama Agama dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir fi Zilalil Qur'an. *El-Warqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 6(1), 2022, 11.

⁵⁴ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021), 161.

dengan teori sosial, terdapat banyak teori utama yang telah diungkapkan oleh para sosiolog, antara lain yaitu teori konflik, teori interaksionisme simbolik, teori tindakan sosial, teori pertukaran dan beberapa teori lainnya seperti teori struktural fungsional.⁵⁵

Struktural fungsional adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian – bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak–seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain.⁵⁶ Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.⁵⁷

Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisme yang didapat dalam biologi. Para tokoh sosiologi awal yang merintis pemikiran dasar mengenai fungsionalisme struktural antara lain, ialah Emile Durkheim, Auguste Comte, Herbert Spencer, ide-ide mereka kemudian mempengaruhi angkatan ahli sosiologi yang lebih muda, seperti Talcott Parsons, Robert K. Merton, dan Anthony Giddens.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid.*, 162.

⁵⁶ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori-teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*, (Makassar: CV Sah Media, 2017) 100.

⁵⁷ Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik*, (Makassar: Carabaca, 2017) 106.

⁵⁸ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, 162.

Menurut Van Den Berghe sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1987) menyatakan bahwa fungsional struktural berangkat dari pokok-pokok pikiran, yaitu:⁵⁹

1. Analisis terhadap masyarakat harus dilakukan secara holistic, oleh karena ia merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan.
2. Hubungan sebab akibat bersifat ganda dan resiprokal.
3. Sistem-sistem sosial berada dalam keadaan yang serasi yang dinamis, sehingga penyesuaian terjadi dengan perubahan-perubahan yang seminimal mungkin.
4. Integrasi sempurna tidak akan tercapai, sehingga setiap sistem sosial menghadapi tekanan-tekanan maupun penyimpangan-penyimpangan yang akan dapat diinternalisasikan melalui pelembagaan.
5. Perubahan merupakan proses penyesuaian yang berjalan lambat (dan bukan merupakan suatu proses revolusioner).
6. Perubahan merupakan konsekuensi penyesuaian perubahan-perubahan yang terjadi di luar sistem, yang ditimbulkan diferensiasi, maupun inovasi-inovasi internal.
7. Sistem tersebut terintegrasi melalui nilai-nilai yang dianut bersama-sama.

Teori fungsional struktural menekan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi

⁵⁹ *Ibid.*, 162-163

manifest dan keseimbangan (*equilibrium*). Pendekatan fungsional menyatakan bahwa integritas yang terjadi pada suatu masyarakat didasarkan oleh kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu kesepakatan umum yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat. Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendekatan fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*.⁶⁰

Para pelopor struktural fungsional berpendapat bahwa setiap kelompok dalam masyarakat akan melaksanakan tugas tertentu dan secara konsisten karena ini mencerminkan dari apa yang disebut sebagai fungsional tersebut, sebuah perilaku atau tindakan sosial akan bisa dibenarkan karena hal tersebut dalam masyarakat dinilai sebagai fungsional. Suatu pola perilaku bisa muncul, dan sekaligus bisa hilang dan berubah sesuai perkembangan sosial yang terjadi, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan dalam masyarakat tertentu.⁶¹

⁶⁰ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, 164

⁶¹ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, 164

Struktural fungsional juga memandang bahwa suatu masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir, yang bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dipandang sebagai sistem yang stabil dengan orientasi ke arah keseimbangan. Ada hasrat untuk saling menjaga keteraturan ini dari setiap komponen masyarakat yang ada. Ada keinginan untuk mempertahankan keteraturan dengan cara sistem kerja yang selaras proposional dan seimbang.⁶²

Talcott Parsons termasuk salah satu pengikut aliran fungsionalisme yang paling populer. Pandangan Parsons mengenai perubahan sosial pada awalnya difokuskan pada sifat struktur sosial yang mengarah pada proses evolusi sosial. Parsons menganalisis proses dan struktur yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem sosial.

Menurut Parsons, sistem sosial terdiri atas sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang memiliki motivasi, dalam arti memiliki kecenderungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang berhubungan dengan situasi yang didefinisikan dan dimediasi dalam simbol bersama yang terstruktur secara kultural.⁶³ Selanjutnya menurut Parsons, agar sistem sosial dapat

⁶² *Ibid.*

⁶³ Wahyu, *Sosiologi Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya*, (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), 116

bekerja dengan baik, setidaknya harus ada empat fungsi yang harus terintegrasi, yaitu :⁶⁴

1. Adaptasi, sebuah sistem ibarat makhluk hidup, artinya agar dapat terus berlangsung hidup, sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Harus mampu bertahan ketika situasi eksternal sedang tidak mendukung.

2. Goal (Pencapaian), sebuah sistem harus memiliki suatu arah yang jelas dapat berusaha mencapai tujuan utamanya. Dalam syarat ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan dan memiliki sumberdaya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif.

3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.

4. Latensi, Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Keempat fungsi tersebut sering disebut AGIL. AGIL ini wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan (survive). Parsons menegaskan, keempat fungsi tersebut merupakan fungsi imperative atau prasyarat berlangsungnya sistem sosial. Ada fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem

⁶⁴ Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 109.

yang hidup. Dua pokok penting yang termasuk ke dalam kebutuhan fungsional ini adalah, pertama yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya. Kedua, yang berhubungan dengan sistem sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan tersebut.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional untuk menjelaskan mengenai tradisi Baritan yang berperan dalam menciptakan kerukunan antara NU dan LDII dengan menggunakan konsep AGIL dari Parsons, dapat dilihat bagaimana Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency dalam tradisi Baritan membantu menjaga dan mengetahui implementasi kerukunan antara NU dan LDII dalam pelaksanaan tradisi Baritan.

⁶⁵ Wahyu, *Sosiologi Tokoh, Teori dan Berbagai Pemikirannya*, 117.